



Kemendikdasmen

**Laporan Kinerja Triwulan II
BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2026**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta selama Triwulan II tahun 2026.

A. Progress Capaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/Indikator/RO	Satuan	Target Tahunan	Triwulan II		Anggaran	
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen						
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	92.8	28.5	2700	Rp3.224.233.000	Rp1.609.146.346
DI.7605.QDB.750 Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	7296	2701	2701	Rp3.224.233.000	Rp1.609.146.346
[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	100	16	0	Rp413.766.000	Rp99.513.412
DI.7605.QDB.751 Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan	Lembaga	6	1	1	Rp413.766.000	Rp99.513.412
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta						
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	-	-	Rp18.251.474.000	Rp11.749.181.641

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Sasaran/Indikator/RO	Satuan	Target Tahunan	Triwulan II		Anggaran	
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi
WA.7606.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0	Rp18.251.474.000	Rp11.749.181.641
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta minimal A	Predikat	AA	-	-	Rp191.173.000	Rp178.610.500
WA.7606.EBA.956 Layanan BMN	Dokumen	1	0	0	Rp7.500.000	Rp7.150.000
WA.7606.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	0	0	Rp183.673.000	Rp171.460.500

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Advokasi kepada Pemda dalam rangka Pemberian Dukungan Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun 22,23 April
2. Koordinasi dengan pemda dalam peningkatan kualitas pembelajaran 1,2 April
3. Sosialisasi Panduan Pelaksanaan G7KAIH 9,10 April 8 Mei
4. Pendampingan satuan pendidikan aman bencana 9,10 dan 21,24 April
5. Advokasi kebijakan Dana Transfer Daerah 14 April
6. Pendampingan pelaksanaan program digitalisasi 21,24 April
7. Pendampingan advokasi kesiapan pelaksanaan program MBG 8,9 April
8. Monev pelaksanaan TKA/AN jenjang SD/SMP 6-14, 20-30 April
9. Pemetaan mutu Pendidikan 8,9 April
10. Koordinasi dengan pemda dalam rangka penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) 20,21 Mei
11. Sosialisasi Panduan Pelaksanaan G7KAIH 8 mei
12. Akselerasi Digitalisasi Pembelajaran 19,20, 21, 22 Mei dan 17-26 Juni
13. Review, Penyusunan, dan Penyelarasan buku pendukung implementasi program MBG 6, 12, 13 Mei
14. Diseminasi pembelajaran dan penilaian ke Pemda dan Satuan Pendidikan 6,7 dan 21, 22 Mei
15. Apresiasi atau penghargaan kepada Pemda dan Sekolah 12,13 Mei

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

16. Pengembangan strategi penuntasan Wajib Belajar yang sesuai dengan kondisi daerah 24, 25 juni
17. Koordinasi dengan pemda dalam peningkatan akses layanan pendidikan melalui program revitalisasi 3,4 Juni
18. Penguatan pelaksanaan UKS, kependuan, ekstrakurikuler, dan G7KAIH 9,10 juni
19. Advokasi Implementasi G7KAIH 23-26 Juni
20. Pendampingan penatausahaan Dana Transfer Daerah 9,10 Juni
21. Pendampingan pelaksanaan program digitalisasi 11-14 Juni
22. Akselerasi Digitalisasi Pembelajaran 17-26 Juni
23. Supervisi Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan 2-12 Juni

Progress/Kegiatan

1. Menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan TW 1, BPMP DIY Mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja organisasi dalam semua kegiatan
2. Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah (Advokasi kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberian Dukungan Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun)

Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 22-23 April 2026 di Hotel Grand Senyum dengan melibatkan 40 peserta yang terdiri atas unsur pemerintah daerah dan BPMP. Kegiatan difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, sinkronisasi program pusat dan daerah, serta identifikasi strategi dukungan kebijakan dan penganggaran. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif yang berdampak pada peningkatan komitmen dalam mendukung percepatan pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juni 2026 di Hotel Grand Senyum dengan peserta sebanyak 40 orang yang terdiri atas unsur pemerintah daerah dan BPMP. Koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan program peningkatan kualitas pembelajaran antara BPMP DIY dan pemerintah daerah, termasuk pembahasan strategi peningkatan kompetensi pendidik, penguatan praktik pembelajaran, serta optimalisasi pemanfaatan berbagai program prioritas Kemendikdasmen. Hasil kegiatan berupa komitmen bersama dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan.

4. Sosialisasi Panduan Pelaksanaan G7KAIH

Sosialisasi dilaksanakan secara daring (webinar) pada tanggal 9-10 April dan 8 Mei 2026 dengan melibatkan unsur pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Kegiatan bertujuan memberikan pemahaman mengenai substansi, mekanisme pelaksanaan, serta strategi implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH). Peserta memperoleh penguatan materi sehingga mampu mengimplementasikan program secara efektif di lingkungan sekolah.

5. Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan (Pendampingan Satuan Pendidikan Aman Bencana)

Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 22, 23, 24, dan 28 April 2026 di 150 satuan pendidikan. Kegiatan meliputi identifikasi kesiapsiagaan sekolah, pendampingan penyusunan dokumen kesiapsiagaan bencana, serta penguatan kapasitas warga sekolah dalam membangun budaya aman bencana. Hasil pendampingan

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

menunjukkan meningkatnya kesiapan satuan pendidikan dalam mengantisipasi dan merespons potensi bencana.

6. Advokasi Kebijakan Dana Transfer Daerah

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2026 di Dinas Pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Advokasi difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan dana BOSP yang bisa dilihat dari terpetakannya permasalahan, kebutuhan dan prioritas program intervensi terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Transfer Daerah/BOSP dalam rangka mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di wilayah DIY

7. Pendampingan Pelaksanaan Program Digitalisasi Pembelajaran

- Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 7–13 Mei 2026 (Tahap 1) dan 25–30 Juni 2026 (Tahap 2) di 10 klaster satuan pendidikan (200 peserta). Kegiatan mencakup instalasi, pengelolaan, dan optimalisasi penggunaan perangkat digital serta pemanfaatan platform Rumah Pendidikan dalam proses pembelajaran. Tim pendamping juga memberikan penguatan literasi digital kepada pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif.
- Supervisi dilaksanakan tanggal 9–12 Juni 2026 di 20 lokasi. Kegiatan bertujuan memantau tindak lanjut hasil pendampingan digitalisasi pembelajaran, memberikan pendampingan teknis kepada satuan pendidikan penerima bantuan perangkat TIK agar mampu memanfaatkan perangkat secara optimal dalam pembelajaran, memperkuat kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif berbasis teknologi, serta mengidentifikasi kendala dalam pemanfaatan perangkat TIK serta . Hasil supervisi dan pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan perangkat digital oleh guru sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut.

8. Pendampingan Advokasi Kesiapan Pelaksanaan Program MBG

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8–9 April 2026 di BPMP DIY dengan jumlah peserta 35 orang. Kegiatan bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemenuhan gizi peserta didik melalui penguatan tata kelola data satuan pendidikan dan sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah. Kegiatan menghasilkan peningkatan Peningkatan koordinasi antara BPMP DIY, Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota / Provinsi dan KPG dalam pelaksanaan MBG tahun 2026.

9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TKA/AN Jenjang SD dan SMP

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai jadwal pada jenjang SMP dan SD dengan sasaran 40 satuan pendidikan. Kegiatan bertujuan memastikan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik/Asesmen Nasional berlangsung sesuai prosedur, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan asesmen pada periode berikutnya.

10. Verifikasi dan Validasi Data Dapodik Pendidikan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21–23 April 2026 di 100 satuan pendidikan. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan, konsistensi, dan validitas data pokok pendidikan. Hasil kegiatan berkontribusi pada peningkatan kualitas data Dapodik sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, dan penyaluran berbagai program pemerintah di bidang pendidikan.

11. Pemetaan Mutu Pendidikan

Kegiatan dalam bentuk workshop dilaksanakan pada tanggal 8–9 April 2026 di BPMP DIY dengan peserta (staf yang menangani rapor pendidikan) sebanyak 30 orang. Kegiatan memberikan Edukasi terkait definisi sekolah bermutu, penggunaan rapor pendidikan dan SPMP, serta menganalisis akar masalah dan mengidentifikasi solusi perbaikan mutu di tingkat wilayah teknik analisis data mutu pendidikan, penyusunan peta mutu, serta pemanfaatan hasil pemetaan sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

12. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juni 2026 di BPMP DIY dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri atas perwakilan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan bertujuan untuk sinkronisasi program antara BPMP Propinsi D. I. Yogyakarta dengan OPD terkait penanganan ATS yang ada di DIY.

13. Akselerasi Digitalisasi Pembelajaran (Coaching Clinic Pemanfaatan Perangkat Digitalisasi Pembelajaran di Satuan Pendidikan)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17-24 Juni 2026 di 40 TPK. Coaching Clinic difokuskan pada peningkatan kapasitas guru dalam mengoperasikan dan mengoptimalkan pemanfaatan perangkat digital sebagai media pembelajaran. Melalui pendampingan langsung, peserta memperoleh pengalaman praktik yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga mendukung transformasi pembelajaran berbasis teknologi.

14. Apresiasi atau Penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan Sekolah

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19-21 Mei 2026 melalui rangkaian Ki Hadjar Dewantara Cup (Lomba Pencak Silat) pada tanggal 19-20 Mei 2026 di BPMP DIY dan puncak acara pada tanggal 21 Mei 2026 di Embung Giwangan, Yogyakarta. Kegiatan bertujuan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, dan peserta didik yang menunjukkan kinerja, inovasi, serta komitmen dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Pemberian penghargaan diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.

15. Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah (Pengembangan Strategi Penuntasan Wajib Belajar Sesuai Kondisi Daerah)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juni 2026 di Hotel GAIA Cosmo dengan peserta sebanyak 40 orang. Pembahasan difokuskan pada penyusunan strategi penuntasan Wajib Belajar 13 Tahun yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Hasil kegiatan berupa rumusan strategi serta rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan.

16. Pemantauan dan Peliputan Pelaksanaan SPMB di Daerah. (merupakan salah satu tindak lanjut dari rekomendasi pada laporan TW 1 2026)

Kegiatan dilaksanakan pada periode Juni hingga awal Juli 2026 dengan sasaran 268 satuan pendidikan dan melibatkan 134 petugas. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berlangsung sesuai ketentuan, transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan SPMB berjalan dengan baik, sementara berbagai temuan di lapangan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

17. Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan (Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Akses Layanan Pendidikan melalui Program Revitalisasi)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juni 2026 di BPMP DIY dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang. Kegiatan bertujuan Melakukan koordinasi dengan pemda/dinas dalam rangka perencanaan dan persiapan program revitalisasi dan USB termasuk konfirmasi data sasaran satuan pendidikan.

18. Pemanfaatan Rumah Pendidikan dan Pengembangan Konten Pembelajaran

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juni 2026 di Hotel Grand Senyum dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Optimalisasi platform digital nasional sebagai pusat sumber belajar, melalui pendampingan pemanfaatan fitur, fasilitasi produksi dan kurasi konten pembelajaran kontekstual, serta penguatan kapasitas pendidik, guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses sumber belajar di satuan pendidikan.

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

19. Penguatan Pelaksanaan UKS, Kepanduan, Ekstrakurikuler, dan G7KAIH

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9–10 Juni 2026 di BPMP DIY dengan peserta sebanyak 36 orang. Materi yang disampaikan mencakup penguatan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), pendidikan kepanduan, kegiatan ekstrakurikuler, serta implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH). Kegiatan menghasilkan peningkatan pemahaman peserta dalam mengintegrasikan program-program tersebut ke dalam budaya sekolah.

20. Pembinaan Penguatan Pendidikan Karakter (Advokasi Implementasi G7KAIH)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23–26 Juni 2026 di 30 klaster satuan pendidikan dengan melibatkan peserta 20 orang pada setiap klaster. Pendampingan difokuskan pada implementasi G7KAIH sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pendampingan dalam menyusun strategi implementasi yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing.

21. Pendampingan Penatausahaan Dana Transfer Daerah

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11–12 Juni 2026 di BPMP DIY dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Pendampingan difokuskan agar satuan Pendidikan dapat Mengelola anggaran dana BOSP secara mandiri dan baik serta memanfaatkan secara optimal untuk memberikan layanan pendidikan ke masyarakat. Hasil kegiatan mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan.

22. Supervisi Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9, 10, 11, 12, 17, 18, 23, dan 24 Juni 2026 di BPMP DIY dalam empat angkatan dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 200 orang. Supervisi dilakukan untuk memastikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan berjalan sesuai standar. Selain memberikan pembinaan, kegiatan juga menghasilkan berbagai rekomendasi perbaikan bagi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

23. Review Penyusunan dan Penyelarasan Buku Pendukung Implementasi Program MBG (Sosialisasi Panduan Pengelolaan MBG)

Kegiatan 1 dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2026 di BPMP DIY dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman mengenai substansi panduan pengelolaan Program MBG sekaligus memperoleh masukan untuk penyempurnaan buku pendukung implementasi program. Hasil kegiatan berupa penyelarasan materi panduan agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

Kegiatan 2 dilaksanakan pada tanggal 19, 22, 26, dan 29 Mei 2026 di 80 satuan pendidikan. Kegiatan bertujuan menyosialisasikan panduan pengelolaan MBG secara langsung kepada satuan pendidikan sekaligus memperoleh umpan balik terhadap implementasinya. Melalui kegiatan ini, satuan pendidikan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola pelaksanaan Program MBG.

24. Fasilitasi Pemantauan Program Prioritas Daerah (Survei Persepsi Publik terhadap Program Prioritas Kemendikdasmen)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026 di Dinas Dikpora Kota Yogyakarta. Survei dilakukan untuk memperoleh gambaran persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program prioritas Kemendikdasmen di daerah. Hasil survei menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyempurnaan kebijakan serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.

25. Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi (Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembelajaran)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1–2 April 2026 di Hotel Alana dengan jumlah peserta sebanyak 31 orang. Koordinasi difokuskan pada penguatan sinergi antara BPMP DIY dan pemerintah daerah dalam mendukung digitalisasi pembelajaran, termasuk penyelarasan program, pemanfaatan platform digital, serta

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

peningkatan kompetensi pendidik. Kegiatan menghasilkan komitmen bersama untuk memperluas implementasi pembelajaran berbasis teknologi di satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan.

Kendala/Permasalahan

1. Ketersediaan dan kehadiran peserta belum sepenuhnya sesuai target karena berbenturan dengan agenda kedinasan, kegiatan pembelajaran, maupun pelaksanaan program prioritas lainnya
2. Tingkat pemahaman dan kapasitas peserta yang beragam menyebabkan kebutuhan pendampingan dan penguatan materi menjadi berbeda pada setiap kegiatan.
3. Pemanfaatan teknologi dan perangkat digital pembelajaran belum optimal karena adanya perbedaan tingkat kompetensi pengguna serta kesiapan infrastruktur TIK di masing-masing satuan pendidikan.
4. Komitmen dan kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan hasil pembinaan masih bervariasi sehingga diperlukan pendampingan lanjutan agar hasil kegiatan dapat berkelanjutan.
5. Efisiensi anggaran dan keterbatasan sumber daya pelaksana mengharuskan adanya penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Ketersediaan dan kehadiran peserta belum sepenuhnya sesuai target

Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan koordinasi dan konfirmasi jadwal kegiatan secara lebih awal dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar tidak berbenturan dengan agenda kedinasan maupun kegiatan pembelajaran. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dapat memanfaatkan metode hybrid atau daring sebagai alternatif sehingga partisipasi peserta tetap dapat dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

2. Tingkat pemahaman dan kapasitas peserta yang beragam

Tindak lanjut yang dilakukan adalah menyusun materi pembinaan yang lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta. Selain itu, perlu dilaksanakan pendampingan lanjutan, konsultasi teknis, serta penyediaan bahan belajar mandiri agar peserta memiliki kesempatan untuk memperdalam materi dan meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan.

3. Pemanfaatan teknologi dan perangkat digital pembelajaran belum optimal

Upaya tindak lanjut dilakukan melalui peningkatan pendampingan teknis dalam pemanfaatan perangkat digital, penguatan kompetensi guru melalui pelatihan dan coaching clinic, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pemenuhan infrastruktur TIK. Di samping itu, optimalisasi komunitas belajar juga perlu didorong sebagai sarana berbagi praktik baik dalam implementasi pembelajaran berbasis teknologi.

4. Komitmen dan kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan hasil pembinaan masih bervariasi

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan monitoring dan pendampingan secara berkala untuk memastikan implementasi hasil pembinaan berjalan sesuai rencana.

5. Efisiensi anggaran dan keterbatasan sumber daya pelaksana

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya, pelaksanaan kegiatan perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penerapan metode daring atau hybrid, serta penentuan prioritas kegiatan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Fasilitasi kemitraan dengan mitra pembangunan dalam penjaminan mutu Pendidikan 12,13 April
2. Pendampingan/advokasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran 2026 jangka menengah dan jangka Panjang 28,29 April
3. Pendampingan Perencanaan SPM Pendidikan 1 April
4. Pendampingan Perencanaan SPM Pendidikan 28,29 Mei

Progress/Kegiatan

1. Pelaksanaan Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan (Fasilitasi Kemitraan dengan Mitra Pembangunan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan)

Kegiatan fasilitasi kemitraan dengan mitra pembangunan dalam penjaminan mutu pendidikan telah dilaksanakan pada tanggal 22-23 April 2026 di BPMP DIY dengan melibatkan 25 peserta yang berasal dari mitra pembangunan dan pemangku kepentingan pendidikan. Kegiatan merupakan kolaborasi antara UPT dan mitra pembangunan dalam rangka mendukung implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP), Mengembangkan inovasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, dan akselerasi implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

2. Pelaksanaan Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan (Advokasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026)

Kegiatan advokasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2026 telah dilaksanakan pada tanggal 29-30 April 2026 di BPMP DIY dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang. Kegiatan dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyusunan Renstra selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan sektoral, dan arah pembangunan daerah, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan hasil (result-based planning). Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta dalam menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

3. Koordinasi dengan Pemangku Kebijakan Pendidikan

Kegiatan koordinasi dengan pemangku kebijakan pendidikan telah dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2026 di TYME Convention Center dengan diikuti oleh 20 peserta. Kegiatan bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pendidikan. Melalui forum koordinasi ini diperoleh kesepakatan mengenai penguatan sinergi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta komitmen bersama dalam mendukung pencapaian target pembangunan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Pendampingan Perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Pendampingan perencanaan SPM Pendidikan telah dilaksanakan melalui dua rangkaian kegiatan. Kegiatan pertama berupa Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2026 di Hotel New Saphir dengan melibatkan 23 peserta. Kegiatan kedua berupa pendampingan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Mei 2026 di Hotel Grand Yuri dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Pendampingan difokuskan pada penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan, termasuk penguatan aspek perencanaan, penganggaran, serta penyusunan indikator kinerja. Melalui kegiatan ini,

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

pemerintah daerah memperoleh pendampingan teknis dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih efektif, terarah, dan selaras dengan kebijakan nasional.

5. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan telah dilaksanakan pada tanggal 25, 26, dan 30 Juni 2026 di 100 satuan pendidikan. Monitoring dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian penerapan SPM Pendidikan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan, serta menghimpun data sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa implementasi SPM Pendidikan di satuan pendidikan telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek perencanaan, pemenuhan layanan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar target pemenuhan SPM dapat tercapai secara optimal.

Kendala/Permasalahan

1. Koordinasi dan sinkronisasi jadwal dengan pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan belum sepenuhnya optimal karena adanya agenda kedinasan yang bersamaan.
2. Implementasi hasil pembinaan dan rekomendasi kegiatan belum sepenuhnya berjalan secara berkelanjutan sehingga masih diperlukan monitoring, pendampingan, dan evaluasi lanjutan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. BPMP DIY akan memperkuat mekanisme koordinasi melalui penyampaian undangan dan agenda kegiatan lebih dini, melakukan konfirmasi kehadiran peserta secara berkala, serta membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan mitra pembangunan untuk memastikan keterlibatan seluruh pihak dalam setiap kegiatan.
2. BPMP DIY akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi hasil pembinaan, memberikan pendampingan teknis sesuai kebutuhan daerah/satuan pendidikan, serta mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan rekomendasi yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta dengan kategori sangat baik

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Pengelolaan Kepegawaian 15,16 April
2. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan 21 April

Progress/Kegiatan

1. Pengelolaan Kepegawaian (Capacity Building Pegawai)

Kegiatan capacity building bagi seluruh pegawai telah dilaksanakan pada 15–16 April 2026 di Agrowisata Amanah, Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

memperkuat kerja sama tim, membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, serta meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai dalam mendukung pencapaian target organisasi. Seluruh rangkaian kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan mendapat partisipasi aktif dari seluruh peserta.

2. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Kegiatan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan telah dilaksanakan pada 21 April 2026 di Ruang Rapat 2 BPMP DIY dengan diikuti oleh 20 peserta. Kegiatan difokuskan pada penguatan tata kelola keuangan, peningkatan pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, serta evaluasi pelaksanaan anggaran untuk memastikan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepahaman mengenai langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan BPMP DIY

3. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah dilaksanakan pada 9 Juni 2026 di Palm Resto dengan diikuti oleh 20 peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola BMN dalam melaksanakan pengelolaan aset negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, serta pelaporan BMN. Selain itu, kegiatan juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi terhadap pengelolaan BMN di lingkungan BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta, identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta penyusunan langkah-langkah perbaikan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib administrasi, akuntabel, efektif, dan efisien.

Kendala/Permasalahan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, namun masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian.

1. Masih ada beberapa pegawai yang tidak bisa mengikuti kegiatan capacity building dengan berbagai alasan
2. Koordinasi antar tim kerja dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan perlu terus diperkuat untuk memastikan kesesuaian antara target kinerja, jadwal pelaksanaan, dan realisasi anggaran.
3. Sinkronisasi antara perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran masih memerlukan penguatan agar realisasi anggaran sejalan dengan capaian output dan outcome.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran masih perlu dioptimalkan agar potensi deviasi terhadap target penyerapan maupun capaian output dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih dini.

Strategi/Tindak Lanjut

Memperkuat koordinasi melalui rapat monitoring dan evaluasi secara rutin, meningkatkan komunikasi antar tim kerja, serta melakukan pemantauan terhadap progres pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian target kinerja.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta minimal A

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Digitalisasi pengukuran kinerja melalui pengembangan dashboard/microsite monitoring kinerja
2. Pelatihan implementasi SAKIP
3. Monitoring kinerja melalui rapat manajemen rutin

Progress/Kegiatan

1. Optimalisasi Pengelolaan Data dan Digitalisasi bukti Kinerja

Mengoptimalkan pemanfaatan Microsite Perencanaan BPMP DIY sebagai media dokumentasi seluruh bukti AKIP, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, monitoring, hingga pelaporan kinerja. Upaya ini bertujuan agar data yang diberikan akurat, andal, dan mudah ditelusuri pada saat evaluasi.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Implementasi AKIP

Mengikutkan pegawai dalam Diklat SAKIP, mengikutkan pegawai dalam zoom meeting rutin dengan Kemenkeu terkait pengelolaan anggaran untuk membangun pemahaman yang sama dan memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas.

3. Untuk menindaklanjuti rekomendasi pada laporan TW 1 tahun 2026 maka dilakukan Penguatan Pengukuran dan Monitoring Kinerja melalui rapat manajemen rutin. Rapat koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian kendala dan hambatan, dan perbaikan pelaksanaan program secara berkelanjutan sehingga target kinerja dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Kendala/Permasalahan

1. Pembaruan data dan kelengkapan bukti di microsite perencanaan masih belum tepat waktu.
2. Budaya kerja berbasis kinerja belum berjalan secara merata.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh tim kerja agar pembaruan data dan unggahan bukti kinerja di microsite perencanaan dilakukan secara tepat waktu dan lengkap.
2. Melakukan koordinasi dan penguatan komitmen seluruh tim kerja agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan serta meningkatkan pemahaman terhadap AKIP.

C. Rekomendasi Pimpinan

1. Memastikan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan selalu berkoordinasi dengan eselon 1.
2. Memastikan seluruh tim kerja memutakhirkan data secara berkala di Microsite Perencanaan sebagai pusat

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

dokumentasi yang akurat, lengkap, dan mudah ditelusuri pada saat evaluasi.

3. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dengan memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran, serta pencapaian output dan outcome

Yogyakarta , 16 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta



Mohammad Adi Hartono, S.E., M.M

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR